

## **Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kecamatan Percut Sei Tuan**

**Ester Senov Fitriani Simanjuntak<sup>1</sup>, Rizal Sanusi<sup>2</sup>, Novia Adelianna Panjaitan<sup>3</sup>, Julia Ivanna<sup>4</sup>, Dian Wahyu<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

e-mail: [estersenovsimanjuntak@gmail.com](mailto:estersenovsimanjuntak@gmail.com)<sup>1</sup>, [hasibuanrizal203@gmail.com](mailto:hasibuanrizal203@gmail.com)<sup>2</sup>, [Noviapanjaitan01@gmail.com](mailto:Noviapanjaitan01@gmail.com)<sup>3</sup>, [juliaivanna@unimed.ac.id](mailto:juliaivanna@unimed.ac.id)<sup>4</sup>, [diansembiring082@gmail.com](mailto:diansembiring082@gmail.com)<sup>5</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini menyoroti partisipasi politik dan kesadaran politik masyarakat Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang dinilai masih rendah. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Pematang Johar lebih fokus pada pekerjaan sehari-hari, seperti bertani dan berdagang, daripada berpartisipasi dalam kegiatan politik. Rendahnya partisipasi politik ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah setempat. Untuk meningkatkan kesadaran politik, strategi yang dilakukan termasuk sosialisasi politik berkala, pemanfaatan media sosial, dan pendidikan politik untuk pemilih pemula. Upaya kolaboratif antara pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik dan menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

**Kata kunci:** *Kesadaran Politik, Partisipasi Politik, Media Sosial, Desa Pematang Johar*

### **Abstract**

This research highlights the political participation and political awareness of the community in Pematang Johar Village, Labuhan Deli District, Deli Serdang Regency, which is considered low. This qualitative study uses a descriptive method to understand the phenomena that occur in the field, with data collection techniques through observation, interviews, documentation, and literature. The research findings indicate that most of the people in Pematang Johar Village are more focused on their daily work, such as farming and trading, rather than participating in political activities. The low political participation is influenced by economic factors, education, and the level of trust in the local government. To increase political awareness, strategies include periodic political socialization, utilizing social media, and political education for novice voters. Collaborative efforts between the government,

village officials, and the community are expected to increase political participation and create fair and honest elections.

**Keywords** : *Political Awareness, Political Participation, Social Media, Pematang Johar Village*

## **PENDAHULUAN**

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi adalah suatu proses dinamis, dimana suatu kegiatan dilakukan dengan maksud untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Gagasan tentang pemerintahan yang berbasis informasi dan menggunakan teknologi bukanlah hal baru di Indonesia. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan dikeluarkan beberapa kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Melalui adanya perubahan paradigma yang pada mulanya dari government menuju ke governance dan berfokus terhadap adanya kolaborasi baik dalam keseimbangan dan juga kesetaraan antara masyarakat atau sipil Society, pihak swasta, dan pemerintah maka dibuat suatu perspektif baru tentang administrasi publik yang diistilahkan sebagai pemerintahan yang baik atau good governance. Disamping itu dengan adanya kemajuan Era Digitalisasi, kebutuhan masyarakat semakin kompleks sehingga harus diikuti dengan optimalisasi pelayanan publik yang prima, dimana instansi-instansi yang berjasa dalam pelayanan publik harus menerapkan Sistem Informasi Manajemen dalam melayani masyarakat demi terciptanya kepuasan kepada masyarakat secara optimal. Adanya globalisasi sekaligus menjadi hasil dari modernitas sosial mengharuskan Pemerintah untuk dapat lebih efisien, transparan, efektif dan juga akuntabel untuk menjalankan urusannya terutama dalam memberikan akses informasi tentang pemerintahan agar bisa mempercepat pemerintah untuk melaksanakan good governance. Good governance tersebut dapat dicapai dengan beragam usaha salah satunya adalah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan bisa diistilahkan menjadi government, hubungannya dalam mewujudkan pelayanan masyarakat dan bisa dinilai sebagai pemerintahan yang baik jika telah terdapat bukti-bukti dari pemerintahan melalui kebijakan dan tindakannya agar dapat menyesuaikan diri dengan adanya perkembangan teknologi. Pemberian layanan publik yang optimal juga menuntut adanya inovasi yang dapat meningkatkan kualitas dan dapat diistilahkan sebagai strategi yang baru maupun kombinasi dari yang lama dengan yang baru agar dapat menghadapi suatu permasalahan atau menyediakan opsi otomatis baru untuk mengelola pemerintahan agar dapat berdampak dengan adanya kebermanfaatannya lebih untuk para penggunanya yakni masyarakat maupun aparatur sipil negara yang memiliki peran dalam menyelenggarakan tugas negara. Inovasi dalam konteks tersebut mempunyai sifat yang tidak dapat diraba serta tidak memiliki wujud tertentu sebab inovasi organisasi dan juga layanan bukan sekedar didasarkan kepada produk yang tidak bisa diamati namun terhadap adanya Transformasi dari para pelakunya yakni antara tiap-tiap

bagian yang adapada suatu organisasi maupun Mitra organisasi. Sesuai dengan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kecamatan Percut Sei Tuan?
2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Peraturan Walikota Medan Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kecamatan Percut Sei Tuan?

## **METODE**

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study* (Abdussamad, 2021) Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Menurut Nazir (2014) penelitian deskriptif meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang diteliti. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Destiani Putri Utami et al., 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Peraturan Walikota Medan Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Dalam menjalankan sebuah pemerintahan berbasis elektronik tentu saja tidak jauh dari sebuah teknologi yang bertujuan untuk meringankan sebuah pekerjaan instansi pemerintahan. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik harus ada dukungan dari pemerintahan setempat maka sebagai mana diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan pemerintahan kota medan yang bertujuan agar efisien dan transparan dalam pemerintahan. Penerapan kebijakan melibatkan beberapa langkah, Perencanaan, pengorganisasian, alokasi sumber daya, pemantauan dan evaluasi. Tujuan utama implementasi kebijakan adalah mentransformasikan kebijakan menjadi tindakan-tindakan yang dapat dilaksanakan oleh para pelaksana dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, instansi swasta, masyarakat dan individu yang terkena dampak kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan.

E-Government setidaknya berperan sangat besar dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat. Ia berfungsi sebagai sebuah terobosan untuk memudahkan masyarakat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat dimana ini sebagai wadah penyampaian pesan dan informasi. Penulis melakukan beberapa pengamatan terhadap penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti lain di lokasi berbeda dan oleh karena itu, penulis adalah orang pertama yang menyandang judul ini “ Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru” pada penelitian ini mengemukakan hasil penelitian dari pengimplementasian implementasi inovasi kebijakan SPBE di kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwasanya implementasi pelayanan pemerintahan atau SPBE bukan sebatas wujud dari pengalihan kerja lembaga pemerintah yang pada mulanya menggunakan sistem manual dan mengarah dengan penggunaan sistem komputerisasi, namun juga termasuk nilai filosofis di dalamnya yaitu wujud kinerja birokrasi dan adanya kedinamisan di dalamnya serta adanya distorsi terhadap lingkungan luar institusi serta tuntutan tentang tertentu yang menghendaki adanya perubahan. Untuk mempercepat pelayanan inovasi yang didasarkan pada SPBE khususnya di kota Pekanbaru, maka dibentuk Berdasarkan hasil pengamatan visual di lapangan, Infrastruktur dan fasilitas layanan SPBE di Diskominfo sudah terbilang sangat lengkap dan membuat publik mendapatkan kenyamanan dan terhindar dari kejenuhan ketika menunggu layanan selesai karena fasilitas ruangan pelayanan yang sudah terbilang sangat baik. Pada pengoperasian fasilitas layanan Jika dilihat melalui situs resmi pemerintahan telah menampilkan berbagai jenis layanan yang ada. Hal ini dibuktikan dari banyaknya jenis inovasi pelayanan yang dibuat oleh Diskominfo kota pekanbaru dan dalam pengoperasian fasilitas layanan online ini. Selain itu, Dalam pengelolaan infrastruktur layanan Diskominfo Juga memperhatikan adanya ketersediaan dari sistem yakni tentang bagaimana kinerja aplikasi tetap dapat berjalan optimal meskipun terganggu jaringan.(Nabila Septia Warman et al., 2022). Selanjutnya pada penelitian serupa juga dengan judul “ E – Government di Kota Surakarta dilihat dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa, Dalam pasal 42 pada Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Layanan SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik terdiri atas e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-performance, dan e-office. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah Kota Surakarta sudah menerapkan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini dibuktikan dengan adanya aplikasi – aplikasi umum pada pemeritahan Kota Surakarta. Aplikasi umum tersebut dapat mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Daerah. Sedangkan layanan publik berbasis elektronik di Kota Surakarta ditunjukkan dengan adanya aplikasi khusus yang dikembangkan oleh pemerintah daerah (Imania & Haryani, 2021).

Berdasarkan hasil peneltian yang dilakukan di Kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Tanjung Selamat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Medan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Pemerintahaan Berbasis Elektronik dari hasil wawancara yang dilakukan bahwasanya dalam penerapan peraturan tersebut sudah terlaksanakan

dengan baik, Sumber Daya Manusia di Pemkot Medan sangat penting karena peran pencetus dan pelaksana smart city adalah pemerintah kota Medan itu sendiri. Dimana kinerja pegawai negeri sipil (PNS) juga dievaluasi setiap bulannya, yang terlihat melalui e-performance, dimana kinerja pegawai negeri sipil dapat dibandingkan antara perencanaan dan realisasinya setiap akhir tahun. Dan juga pemberian insentif berupa tunjangan pegawai negeri (TPP) dan tunjangan pegawai negeri sipil akan disesuaikan dengan tunjangan yang mereka berikan dan yang mereka berikan sehari-hari. Dengan demikian, setiap karyawan memiliki bebannya sendiri, dan kinerja satu layanan dapat dibandingkan dengan layanan lainnya.

### **Faktor-faktor mempengaruhi implementasi**

#### **1. Komunikasi**

Jika program implementasi dan masyarakat berkomunikasi secara efektif, maka setiap kebijakan akan dilaksanakan dengan benar. Pelaksana harus mengomunikasikan tujuan dan kebijakan secara efektif. Penting untuk menyampaikan tujuan dan langkah-langkah dasar secara konsisten agar yang menerapkannya dapat memahaminya dengan baik. Maksud dan tujuan program politik dapat disosialisasikan. Untuk secara efektif mencegah penyimpangan dalam kebijakan dan program.

#### **2. Sumber Daya Manusia**

Mebutuhkan sumber daya yang cukup untuk dijalankan Kebijakan itu berhasil. Termasuk sumber daya manusia dan keuangan. Sekalipun kebijakan tersebut telah ditafsirkan secara jelas dan konsisten, jika Implementasinya terhambat karena kurangnya sumber daya tidak akan berfungsi secara efektif.

### **SIMPULAN**

Dari penelitian tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kecamatan Medan Tuntungan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan langkah progresif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Peraturan Walikota Medan yang mengamanatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Medan Tuntungan menunjukkan komitmen untuk memajukan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap tuntutan zaman.

Dalam implementasi peraturan tersebut, terdapat upaya untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mempermudah akses informasi, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Dengan adopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik, diharapkan terjadi transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, yang lebih efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Evaluasi berkala terhadap implementasi peraturan tersebut menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program, mengevaluasi dampaknya, dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan perubahan kebutuhan dan teknologi.

Dengan demikian, implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kecamatan Medan Tuntungan adalah langkah penting menuju pemerintahan yang modern, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Diharapkan langkah ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan inovasi teknologi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap perkembangan zaman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Imania, A. N., & Haryani, T. N. (2021). E – Government di Kota Surakarta Dilihat dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Wacana Publik*, 1(1), 176. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.53143>
- Nabila Septia Warman, Syamsir Syamsir, Muhammad Maldini, Over Nurhasanah, Nadya Rahmah Oktariandani, & Iqur Hafizh Syafikruzi. (2022). Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 1(2), 132–148. <https://doi.org/10.55606/mateandrau.v1i2.161>
- mujahiidin, anwar. *metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*. 2019.
- Nasution, Edi Marjan. "konsep dan prinsip keuangan sosial islam." *jurnal akuntansi dan pajak* (2024).
- Utami, Destiani Putri. "Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi." *Jurnal Inovasi Penelitian* (2021).